

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Bagus Adi. 2013. *“Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri”*. Diakses 27 Januari 2013, <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/33957>
- Pasimargus, Yunus. 2010. *“Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pajak Reklame Pada Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta”*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Ridwan. 2013. *“Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan”*. eJournal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No.2 Tahun 2013.
- Ridwan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis lengkap dengan aplikasi SPSS 14*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Penerbit PT Rafihan Aditama.
- Sri, Handoko. 2013. *“Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”*. Jurnal Ilmiah Universitas Tanjung Pura. Vol. 1. No. 1 (2013).
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Ke 3*. Penerbit Indeks.

Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. "*Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7. No. 2. September 2008: 162-173.

Triantoro, Arvian. 2010. "*Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung*". Jurnal Ilmiah STIE Pelita Nusantara Semarang. Vol. 5. No. 1.

Trywilda, Arinda, Hamid Bone, dan Annisa A Lahjie. 2011. "*Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda*". Jurnal Ilmiah Universitas Mulawarman Samarinda. Vol. 1. No. 1 (2013).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.